

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kondisi kemiskinan merupakan suatu keadaan ketika individu atau unit keluarga mengalami keterbatasan sumber daya finansial yang signifikan, yang mengakibatkan ketidakmampuan mereka dalam mencukupi kebutuhan-kebutuhan fundamental, meliputi sandang, pangan, papan, pelayanan kesehatan, serta akses terhadap pendidikan. Kemiskinan bukan hanya sekadar masalah ekonomi, tetapi juga merupakan fenomena sosial yang kompleks, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tingkat pengangguran yang tinggi, rendahnya keterampilan kerja, akses pendidikan yang terbatas, masalah kesehatan, konflik sosial, ketidakstabilan politik, serta diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan (Zulfa et al., 2023).

Kemiskinan menjadi tantangan serius bagi negara karena berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan perkembangan ekonomi. Tingginya angka kemiskinan dapat mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesenjangan sosial. Salah satu dampak signifikan dari kemiskinan adalah terganggunya ketahanan pangan, di mana banyak keluarga miskin tidak mampu memenuhi asupan gizi yang cukup, sehingga berisiko mengalami malnutrisi dan berbagai masalah kesehatan. Selain itu, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan juga menjadi terbatas, yang pada akhirnya memperkuat siklus kemiskinan antar generasi.

Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program bantuan sosial yang bertujuan untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat miskin dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Salah satu program utama yang diterapkan adalah Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), yang merupakan skema bantuan sosial dalam bentuk saldo elektronik yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan tertentu melalui e-Warong (Elektronik Warung Gotong Royong). Berbeda dengan sistem bantuan berbasis tunai atau distribusi langsung barang, BPNT dirancang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran bantuan, serta mendorong inklusi keuangan dengan melibatkan lembaga perbankan sebagai penyalur dana bantuan.

Melalui BPNT, masyarakat penerima manfaat diharapkan dapat memiliki akses yang lebih baik terhadap pangan bergizi, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan mencegah dampak negatif dari ketahanan pangan yang rendah. Namun, dalam implementasinya, program ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, kurangnya transparansi dalam seleksi penerima, serta keterbatasan akses ke e-Warong di beberapa daerah terpencil. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme seleksi yang lebih objektif dan berbasis data, guna memastikan bahwa BPNT benar-benar diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan, serta dapat berjalan secara lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan..

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), per Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat sebesar 25,22 juta orang atau setara dengan 9,03% dari total populasi. Meskipun angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan

tahun sebelumnya, permasalahan kemiskinan tetap menjadi perhatian utama, terutama di daerah pedesaan yang memiliki akses terbatas terhadap bantuan sosial yang tepat sasaran.

Di Provinsi Bali, berdasarkan data BPS per September 2024, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 3,80%, turun 0,20 persen poin dari Maret 2024. Jumlah penduduk miskin di provinsi ini mencapai 176,21 ribu orang, dengan penurunan sebesar 8,22 ribu orang dibandingkan Maret 2024. Persentase kemiskinan di pedesaan Bali pada periode yang sama adalah 5,11%, sedikit menurun dari 5,20% pada Maret 2024.

Kabupaten Buleleng, sebagai bagian dari Provinsi Bali, juga mengalami penurunan tingkat kemiskinan. Berdasarkan rilis BPS per Oktober 2023, tingkat kemiskinan di Kabupaten Buleleng sebesar 5,85%, turun dari 6,21% pada tahun 2022. Kemiskinan ekstrem di kabupaten ini juga menurun signifikan, dari 0,28% pada tahun 2021 menjadi 0,05% pada tahun 2022. Salah satu wilayah di Kabupaten Buleleng yang masih menghadapi tantangan dalam implementasi program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) adalah Desa Pelapuan, yang terletak di Kecamatan Busungbiu.

Desa Pelapuan merupakan desa dengan jumlah penduduk sekitar 2.531 jiwa, di mana sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian dan perdagangan kecil. Meskipun terdapat program bantuan seperti BPNT, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam proses seleksi penerima bantuan. Berdasarkan laporan masyarakat dan pengamatan di lapangan, ditemukan bahwa proses seleksi penerima BPNT di Desa Pelapuan belum berjalan optimal, karena masih dilakukan secara manual dan subjektif.

Hal ini menyebabkan bantuan tidak selalu tepat sasaran, di mana beberapa warga yang sebenarnya memenuhi kriteria tidak menerima bantuan, sementara individu yang tidak memenuhi kriteria justru mendapatkan bantuan.

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara harapan dan kenyataan dalam distribusi BPNT di Desa Pelapuan. Idealnya, program BPNT diberikan kepada masyarakat miskin yang benar-benar memenuhi kriteria secara objektif dan transparan. Namun, dalam kenyataannya, proses seleksi yang masih bersifat manual dan subjektif menyebabkan ketidaktepatan sasaran, kecemburuan sosial, dan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan sosial. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengambilan keputusan yang lebih objektif dan berbasis data untuk meningkatkan akurasi dan transparansi dalam seleksi penerima BPNT.

Untuk menangani problematika tersebut, dapat diimplementasikan suatu pendekatan yang mengintegrasikan metodologi *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dengan teknik *Weighted Product* (WP). Dalam implementasi ini, metodologi AHP berfungsi sebagai instrumen penetapan pembobotan serta hierarki prioritas terhadap setiap kriteria melalui evaluasi yang bersifat rasional dan terstruktur, sementara teknik WP berperan dalam proses komputasi dan asesmen terhadap seluruh alternatif dengan memanfaatkan nilai bobot kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan menerapkan kombinasi AHP dan WP, diharapkan proses seleksi penerima BPNT di Desa Pelapuan dapat dilakukan secara lebih adil, akurat, dan transparan. Pendekatan ini tidak hanya membantu dalam menyusun sistem yang sistematis, tetapi juga meningkatkan efektivitas program BPNT dalam

mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin secara tepat sasaran.

## 1.2 Rumusan Masalah

Bertolak dari paparan latar belakang yang telah dijelaskan, maka permasalahan penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut.

1. Bagaimana metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) digunakan untuk menentukan bobot kriteria?
2. Bagaimana metode *Weighted Product* (WP) diterapkan untuk menentukan kelayakan penerima BPNT berdasarkan bobot tersebut?
3. Bagaimana kombinasi metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dan *Weighted Product* (WP) dapat digunakan untuk menentukan bobot kriteria dan menetapkan kelayakan penerima BPNT secara objektif dan tepat sasaran di Desa Pelapuan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menjelaskan penerapan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dalam menentukan bobot setiap kriteria yang digunakan dalam proses seleksi penerima BPNT.
2. Untuk menerapkan metode *Weighted Product* (WP) dalam menentukan kelayakan penerima BPNT berdasarkan bobot kriteria yang telah ditentukan melalui metode AHP.
3. Untuk mengkaji efektivitas kombinasi metode AHP dan WP dalam menghasilkan sistem seleksi penerima BPNT yang objektif, adil, dan tepat sasaran di Desa Pelapuan.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Implikasi positif yang dapat dicapai berdasarkan hasil kajian ini mencakup beberapa hal sebagai berikut.

### 1. Manfaat Teoritis

Studi ini memberikan kontribusi terhadap kemajuan keilmuan, terutama dalam ranah sistem penunjang pengambilan keputusan (*Decision Support System*), melalui implementasi pendekatan terintegrasi yang mengombinasikan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dengan *Weighted Product* (WP) untuk keperluan evaluasi eligibilitas calon penerima program bantuan sosial.. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengembangkan model pengambilan keputusan yang objektif dan berbasis data.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Meningkatkan Efisiensi dan Akurasi Penyaluran Bantuan

Penerapan metode AHP dan WP diharapkan dapat membantu Pemerintah Desa Pelapuan dalam menentukan penerima BPNT dengan lebih cepat, akurat, dan transparan, sehingga penyaluran bantuan menjadi lebih efisien.

#### b. Mewujudkan Keadilan dalam Distribusi Bantuan

Dengan sistem yang berbasis data dan kriteria objektif, bantuan dapat diberikan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan, sehingga mengurangi potensi kesalahan dalam seleksi penerima serta mencegah ketidakadilan sosial.

#### c. Memberikan Rekomendasi bagi Pemerintah dan Lembaga Sosial

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan organisasi sosial dalam meningkatkan kualitas distribusi bantuan sosial lainnya, terutama yang memerlukan mekanisme seleksi penerima berbasis data.

d. Mendorong Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan Publik

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam program bantuan sosial, yang berpotensi untuk diterapkan dalam skema bantuan lainnya di tingkat desa maupun nasional.

### 1.5 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa batasan yang ditetapkan untuk mengarahkan fokus penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Kriteria Kelayakan Penerima

Penelitian ini hanya menggunakan beberapa kriteria kelayakan penerima BPNT di Desa Pelapuan, meliputi pendapatan keluarga, jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan, kepemilikan aset, status pekerjaan, status tempat tinggal.

2. Lingkup Data yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan data penerima BPNT hanya dari Desa Pelapuan untuk periode tahun 2024. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi ke daerah lain yang memiliki karakteristik sosial dan ekonomi berbeda. Selain itu, data yang digunakan terbatas pada data resmi yang diperoleh dari pemerintah desa, tanpa mencakup sumber data

tambahan dari instansi lain yang mungkin memiliki informasi lebih lengkap.

### 3. Metode Analisis yang Digunakan

Penelitian ini fokus pada penggunaan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dan *Weighted Product* (WP) untuk menentukan kelayakan penerima BPNT.

### 4. Validitas Data

Penelitian ini mengasumsikan bahwa data yang digunakan dalam analisis adalah valid dan akurat. Ketidaktepatan data input, seperti kesalahan dalam pencatatan pendapatan atau jumlah anggota keluarga, dapat memengaruhi hasil akhir penelitian, tetapi tidak diatasi secara khusus dalam penelitian ini.

